

BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK

TEORI DAN APLIKASINYA



Evi Satispi dan Kurniasih
Editor: Retnowati WD Tuti

BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK

CETAKAN PERTAMA TAHUN 2019

PENULIS :

Dr. Evi Satispi, M. Si

Dr. Kurniasih Mufidayaiti, M. Si

KATA PENGANTAR :

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. R

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

PENERBIT :

UMJ PRESS 2019

KATA PENGANTAR **(BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK)**

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. R
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

Kebijakan publik menjadi suatu hal yang cukup sulit karena kajiannya mencakup berbagai disiplin ilmu atau setidaknya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat. Oleh sebab itu, kebijakan sebagai ilmu bersifat interdisiplin bahkan intradisiplin. Analisis kebijakan publik adalah kajian terhadap kebijakan publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkontekstualkan model dan riset dari disiplin-disiplin yang mengandung orientasi masalah dan kebijakan.

Lebih jauh lagi, kebijakan adalah sub-bidang terapan yang isinya tidak dapat ditentukan berdasarkan disiplin yang terbatas, tetapi berdasarkan hal-hal yang tampaknya sesuai dengan situasi masalah (kontekstual) dan hakekat/sifat dari persoalan (Wildavsky 1979). Orientasi dari ilmu kebijakan publik sendiri memiliki sifat multi metode, multi disiplin, berfokus pada masalah, berkaitan dengan proses kebijakan dan hasil dari suatu kebijakan, serta bertujuan untuk memadukan pengetahuan ke dalam suatu disiplin yang menyeluruh untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan.

Dalam menganalisis suatu kebijakan maka biasanya diawali dengan adanya isu-isu yang berkembang di masyarakat. Isu-isu ini kemudian diangkat menjadi suatu masalah apabila memang isu yang ada di masyarakat layak untuk diangkat menjadi suatu masalah dalam masyarakat. Berdasarkan masalah yang diangkat itu kemudian analisis kebijakan mencari berbagai solusi yang seharusnya diterapkan. Proses pembuatan kebijakan bukan hanya tentang menganalisis suatu masalah, melainkan juga menganalisis mengenai berbagai pilihan kebijakan atau solusi yang harus diambil dan analisis mengenai dampak apa yang akan terjadi akibat diterapkannya kebijakan publik yang baru.

Isu kebijakan umumnya muncul karena telah terjadi silang pendapat (biasanya dalam debat publik) di antara para tokoh (aktor) mengenai hal tertentu. Perdebatan tersebut biasanya mengenai rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Munculnya isu kebijakan ini umumnya timbul karena telah terjadi konflik atau perbedaan

persepsi di antara para aktor atas situasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada suatu waktu tertentu.

Isu sendiri sejatinya bukan tentang adanya masalah atau ancaman, namun dengan adanya isu ini dapat membuat suatu kebijakan baru yang memang lebih layak untuk diterapkan karena memiliki kebermanfaatan yang sangat tinggi bagi masyarakat. Menurut Dunn (1990) berdasarkan tingkat penting atau tidaknya suatu isu, isu diklasifikasikan menjadi isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu minor/marginal (isu pinggiran). Semakin tinggi peringkat suatu isu maka semakin mungkin diangkat menjadi suatu permasalahan dalam kebijakan publik yang nantinya akan dibahas dalam penyusunan agenda, hal tersebut karena isu tersebut memiliki posisi yang strategis secara politis.

Melalui buku Ajar ini berjudul Kebijakan Publik yang ditulis oleh Dr. Evi Satispi, M.Si. dan Dr. Kurniasih Mufidayaiti, M. Si, diharapkan bisa lebih memperkaya wawasan pembaca serta menjadi bahan pelajaran bagi mahasiswa tentang kebijakan publik di Indonesia hingga kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sejak dahulu hingga sekarang.

PENGANTAR PENULIS

Ilmu kebijakan diarahkan kepada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan orientasi utama dari para ilmuwan kebijakan bukanlah pada tahapan proses pembuatan kebijakan, tetapi kepada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki latar belakang yang kuat berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan seperti, apakah isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan, apakah isu tersebut sensitif yang cepat menarik perhatian masyarakat, apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat, apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan, apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi, dan terakhir apakah isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat?

Itu sebabnya, suatu kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum sudah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Kebijakan-kebijakan publik yang dibuat pemerintah, dalam hal ini presiden selaku penyelenggara pemerintahan merupakan hal yang sangat penting, sebab pemerintah sudah seharusnya membuat perubahan-perubahan di segala bidang, baik di dunia pendidikan demi tercapainya pelaksanaan pendidikan yang lebih baik, perubahan kebijakan di bidang ekonomi yang bertujuan agar tingkat ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, dan perubahan-perubahan kebijakan di berbagai sektor. Tujuannya hanya satu, demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kita semua berharap, presiden selaku penyelenggara pemerintahan, dalam membuat kebijakan sebaiknya jangan hanya mempertimbangkan apak-

ah isu tersebut telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan, apakah isu tersebut sensitif, apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu, apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan, apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi, dan apakah isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat. Tetapi sebaiknya, buatlah kebijakan yang memang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dan memang sangat dibutuhkan masyarakat tanpa pandang bulu dan banyak pertimbangan.

Dr. Evi Satispi, M. Si

Dr. Kurniasih Mufidayaiti, M. Si

DAFTAR ISI

PENGANTAR

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. R	iii
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)	

PENGANTAR PENULIS

Dr. Evi Satispi, M. Si	v
Dr. Kurniasih Mufidayaiti, M. Si	

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang	1
Deskripsi Mata Kuliah	2
Karakteristik Peserta Mahasiswa.....	2
Tujuan pembelajaran	3
Manfaat bahan ajar	3
Materi pokok	3

BAB II DEFENISI DAN MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK

Pendahuluan	5
Beberapa Defenisi Dan Makna Kebijakan Publik.....	6
Kebijakan Publik Dan Kepentingan Publik	30
Tipologi Kebijakan Publik	39
Rangkuman.....	50
Latihan.....	52

BAB III PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Pendahuluan	53
Makna Kebijakan Publik Sebagai Proses.....	54
Pendekatan Dalam Pembuatan Kebijakan Publik	62
Proses Teknokratis Dan Demokratis	82
Rangkuman.....	85
Latihan.....	86

BAB IV MODEL/PENDEKATAN KEBIJAKAN

Pendahuluan	87
-------------------	----

Beberapa Model/Pendekatan Kebijakan Publik	88
Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan Publik	93
Kajian Kebijakan Publik Deliberatif	99
Rangkuman.....	113
Latihan.....	114

BAB V IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK

Pendahuluan	115
Wilayah Dan Ruang Lingkup Masalah Kebijakan.....	116
Karakteristik Masalah Kebijakan	125
Merumuskan Masalah Kebijakan.....	130
Rangkuman.....	135
Latihan.....	136

BAB VI MENYUSUN AGENDA KEBIJAKAN

Pendahuluan	137
Arti Agenda Kebijakan.....	138
Penyusunan Agenda Kebijakan (<i>Agenda Setting</i>).....	141
Agend Sistemik, Institusional dan Kebijakan	146
Rangkuman.....	148
Latihan.....	148

BAB VII MEMFORMULASI KEBIJAKAN

Pendahuluan	149
Model Perumusan Kebijakan	150
Aktor-Aktor dalam Perumusan Kebijakan	182
Desain, Adopsi Dan Legitimasi Kebijakan	186
Rangkuman.....	192
Latihan.....	193

BAB VIII MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN

Pendahuluan	194
Implementasi Kebijakan.....	195
Model Implementasi Kebijakan	203
Aktor Pelaksana Kebijakan	218
Instrumen Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan	222

Rangkuman.....	225
Latihan.....	225

BAB IX MENGEVALUASI HAL DAN DAMPAK KEBIJAKAN

Pendahuluan	227
Arti Dan Jenis Evaluasi Kebijakan.....	227
Kriteria Evaluasi Kebijakan	238
Analisis Dampak Kebijakan.....	246
Rangkuman.....	254
Latihan.....	255

DAFTAR PUSTAKA	256
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal pertama Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan dan Pengajaran. Hal ini sangat penting dalam suatu proses belajar pada institusi pendidikan manapun. Adapun Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik atau mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tanpa proses belajar yang baik, tentunya SDM unggul dan berkualitas akan minim dihasilkan dan tentunya akan berefek kepada proses pembangunan bangsa. Orang-orang hebat yang mengelola dan memberikan dampak kemajuan bagi Indonesia, tentu saja berawal dari proses belajar yang baik. Walauun memang proses belajar tidak selalu di lembaga formal seperti perguruan tinggi, tetapi usaha belajar di perguruan tinggi harus benar-benar berkualitas dan memastikan hasilnya akan baik.

Berdasarkan kondisi itulah buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa tentang cakupan ilmu kebijakan publik melalui pembelajaran tentang kebijakan publik dalam kehidupan bernegara.

Proses pembelajaran membutuhkan sumber atau referensi yang jelas dalam suatu kegiatan perkuliahan, untuk itu dibutuhkan bahan ajar yang relevan dan mendukung untuk terciptanya suatu pengetahuan yang komprehensif. Bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya (Widodo

dan Jasmadi dalam Lestari, 2013:1). Pengertian ini menjelaskan bahwa suatu bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah intruksional karena akan digunakan oleh dosen untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran.

Bahan ajar Kebijakan Publik merupakan bahan ajar yang sangat penting bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan perkuliahan dalam mempersiapkan dan membentuknya sebagai lulusan terbaik dan profesional sebagai analisis kebijakan, dengan demikian bahan ajar ini akan menjadi panduan bagi mahasiswa dalam memahami Kebijakan Publik dan memberikan solusi-solusi untuk publik.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Bahan ajar ini memfasilitasi pemahaman pengetahuan mahasiswa tentang ilmu kebijakan publik. Perkuliahan ini disajikan secara interaktif, melalui kombinasi metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam menjelaskan hubungan antara masalah publik dan peran negara, serta mampu mengidentifikasi jenis-jenis studi kebijakan.

Buku ajar ini terdiri dari 8 bab, untuk keberhasilan mempelajari modul ini, mahasiswa dapat melakukan berbagai kegiatan belajar, baik secara mandiri maupun berkelompok. Selain itu untuk menambah wawasan mengenai mata kuliah kebijakan publik, mahasiswa dapat menggunakan referensi lain selain dari buku ajar ini setelah berkonsultasi dengan tenaga pengajar.

C. Karakteristik Peserta Mahasiswa

Buku ajar ini diperuntukan bagi mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan kebijakan publik. Selain itu mahasiswa adalah calon sarjana yang mampu mengelola berbagai jenis organisasi secara komprehensif dan kemampuan mengambil keputusan strategis dalam mengidentifikasi,

menganalisis, dan menangani masalah-masalah publik berdasarkan landasan metodologis.

D. Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa memiliki pemahaman, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan etika kebijakan dalam merumuskan masalah kebijakan.

E. Manfaat bahan ajar

1. Tenaga pengajar/dosen; sebagai rujukan pelaksanaan proses pembelajaran/perkuliahan sesuai materi pokok yang telah diterapkan, kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan memudahkan dalam mempelajari setiap bab.
2. Mahasiswa; sebagai salah satu sumber belajar yang dilengkapi dengan latih-latihan untuk mahasiswa dengan tujuan mengukur sejauh mana mahasiswa mampu memahami bahan ajar ini dan sebagai sumber rujukan mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap dosen.

F. Materi pokok

Pertemuan	Pokok Pembahasan	Metode
I	PENDAHULUAN : 1. Tujuan mata kuliah 2. Ruang lingkup mata kuliah 3. Kebijaksanaan pelaksanaan perkuliahan 4. Kebijaksanaan penilaian hasil belajar 5. Tugas yang harus diselesaikan 6. Buku ajar 7. Kebutuhan belajar mahasiswa 8. Lain-lain	Ekspositori
II	Defenisi Dan Makna Kebijakan Publik; Beberapa Defenisi Dan Makna Kebijakan Publik, Kebijakan Publik Dan Kepentingan Publik, Tipologi Kebijakan Publik	Ceramah, tanya jawab
III	Proses Kebijakan Publik; Makna Kebijakan	Ceramah, tanya

	Publik Sebagai Proses, Proses Teknokratis Dan Demokratis	jawab
IV	Model/Pendekatan Kebijakan; Beberapa Model/Pendekatan Kebijakan Publik, Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan Publik, Kajian Kebijakan Publik Deliberatif	Ceramah, tanya jawab, diskusi dan presentasi
V	Identifikasi Dan Perumusan Masalah Kebijakan Publik; Karakteristik Masalah Kebijakan, Wilayah Dan Ruang Lingkup Masalah Kebijakan, Merumuskan Masalah Kebijakan	Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi
VI	Menyusun Agenda Kebijakan; Arti Agenda Kebijakan, Penyusunan Agenda Kebijakan, Agend Sistemik, Institusional Dan Kebijakan	Ceramah, tanya jawab
VII	Memformulasi Kebijakan; Model Perumusan Kebijakan, Aktor Dalam Agenda Perumusan Kebijakan, Desaian, Adopsi Dan Legitimasi Kebijakan	Diskusi sesuai kelompok, Presentasi
VIII	Mengimplementasikan Kebijakan; Model Implementasi Kebijakan, Aktor Pelaksana Kebijakan, Instrumen Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan	Ceramah, diskusi, studi kasus, presentasi

RIWAYAT PENULIS



Dr. Evi Satispi, S.P., M.Si.

Sejak lama, permasalahan sosial sudah menjadi concern Dr. Evi Satispi, S.P., M.Si. itu sebabnya wanita kelahiran Puerwakarta ini banyak terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial, utamanya yang melibatkan masyarakat terpinggirkan seperti anak jalanan. Bahkan dosen tetap pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini juga sudah beberapa kali menjadi pembicara di beberapa forum nasional terkait dengan konsentrasinya tersebut.

Evi Satispi menyelesaikan pendidikan S1/Strata I di Institut Pertanian Bogor (IPB) Fakultas Pertanian Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga (1995). Merampungkan S2/Strata II di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Program Studi Magister Ilmu Administrasi (2006). Pada 2013, Ketua Pengelola Lab School FIP UMJ ini berhasil menyelesaikan S3/Strata III di Universitas Satyagama pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Disertasi Pengaruh Peranan Dinas Pendidikan Kinerja Kepala Sekolah, Kinerja Guru dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan Sekolah Dasar di Kota Tangerang Selatan.

Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si.

Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si, saat ini diberi amanah sebagai Sekretaris Prodi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kurniasih Mufidayati menyelesaikan pendidikan S1/Strata I di Universitas Negeri Semarang Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, melanjutkan S2/Strata II di Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Administrasi & Kebijakan Pendidikan, dan menempuh pendidikan S3 (Doktoral) di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi. Karya tulis buku yang sudah dituliskannya yaitu; Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai Bentuk Otonomi Pendidikan, Dinamika Perkembangan Ilmu Administrasi.



Penerbit



Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu
Ciputat, Tangerang Selatan
Telp. : 021-7492862, 7401894

ISBN 978-602-0798-51-6

